

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH
URUSAN WAJIB/PILIHAN : PERHUBUNGAN

Nama OPD : Dinas Perhubungan
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026/RKPD Tahun 2025
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Perhubungan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator kerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai resiko	Rencana Tindak pengendalian
			Uraian	Kode resiko	pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	terdapat sarana prasarana perhubungan yang belum menunjang kelancaran dan keselamatan pengguna jalan			- Fasilitas perlengkapan jalan yang kurang memadai dikarenakan rusak/aus habis umur ekonomisnya	Internal/Eksternal		Munculnya potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas	Pengguna sarana prasarana lalu lintas	2	2	4	- Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Percentase Peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang berkualitas	Adanya kemacetan dan antrian panjang kendaraan			Kondisi lalu lintas yang dinamis dan pengembangan tata guna lahan yang membuat sirkulasi arus lalu lintas yang tidak bisa di prediksi (Uncreditable)			Meningkatnya kemacetan lalu lintas di ruas jalan utama Kab.Lamongan	Masyarakat / Pemerintah				
			Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan kurangnya kesadaran pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas			-orientasi Perilaku pengguna jalan yang tidak berkeselamatan dan melanggar	Internal/Eksternal		Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan	Masyarakat / Pemerintah	2	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan daerah rawan lalu lintas (Black Spot) - Penambahan pengadaan rambu lalu lintas -Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagai bahan pengambilan kebijakan

	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana perhubungan yang berfungsi	Belum maksimalnya penyelenggaraan LL AJ			Sinergitas Kegiatan dengan melibatkan semua stakeholder	Internal/Eksternal	Tidak tercapainya Norma, standar, prosedur dan kriteria	Masyarakat / Pemerintah	2	2	4	-adanya Monitoring dan evaluasi yang integratif
Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasangan & Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum	Masih banyak ruas jalan di Kabupaten yang belum terpasang lampu penerangan jalan umum sebagai upaya menunjang kelancaran dan keselamatan pengguna jalan				Kondisi lampu penerangan jalan umum(tiang, pondasi, lampu, jaringan kabel) yang rusak akibat keausan dan faktor alam	Internal/Eksternal	Munculnya potensi banyak lampu penerangan jalan umum yang padam	Masyarakat / Pemerintah				Menambah lampu penerangan jalan umum di ruas jalan Kabupaten
													Melaksanakan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kurang disiplin petugas parkir dilapangan			SDM yang masih belum memahami tentang disiplin kerja	Internal/Eksternal	Dilapangan masih sering dijumpai tidak memakai atribut lengkap	Masyarakat / Pemerintah					Melakukan pembinaan dan monitoring parkir
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Presentase kenaikan jumlah wajib uji di kabupaten lamongan	terdapat sarana prasarana UPT PKB yang belum menunjang			Fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor yang kurang memenuhi syarat ke Euro 4 faktor SDM kompetensi pengudi kendaraan bermotor yang masih kurang	Internal/Eksternal	Munculnya potensi kecelakaan kendaraan bermotor	Masyarakat / Pemerintah	2	2	4		Meningkatkan fasilitas alat uji dan sdm pengudi kendaraan bermotor
Pengadaan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api	Jumlah Pengadaan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api	Banyak terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Lamongan			Minimnya rambu peringatan dan kurangnya palang pintu perlintasan sebidang yang belum terpasang		Mengurangi angka kecelakaan yang terjadi akibat belum terpasangnya palang pintu kereta api						Memasang rambu peringatan dan palang pintu perlintasan sebidang di lokasi yang belum terpasang

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. M. S. HERUWIDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 198809 1 003